

**RANCANGAN AKHIR**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Untuk itu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara menyusun Perubahan Renja tahun 2025, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Renja ini.

Sukamara, Juni 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi Informatika dan Persandian  
Kabupaten Sukamara



**DENNY YUDHISTIRA KURNIAWAN, S.IP**  
NIP. 19750708 200312 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4 Sistematika Penulisan ..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 21

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. .... 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 28

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 33

BAB III TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional ..... 34

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 40

3.3 Program dan Kegiatan... .. 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 53

BAB V PENUTUP ..... 68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten /Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

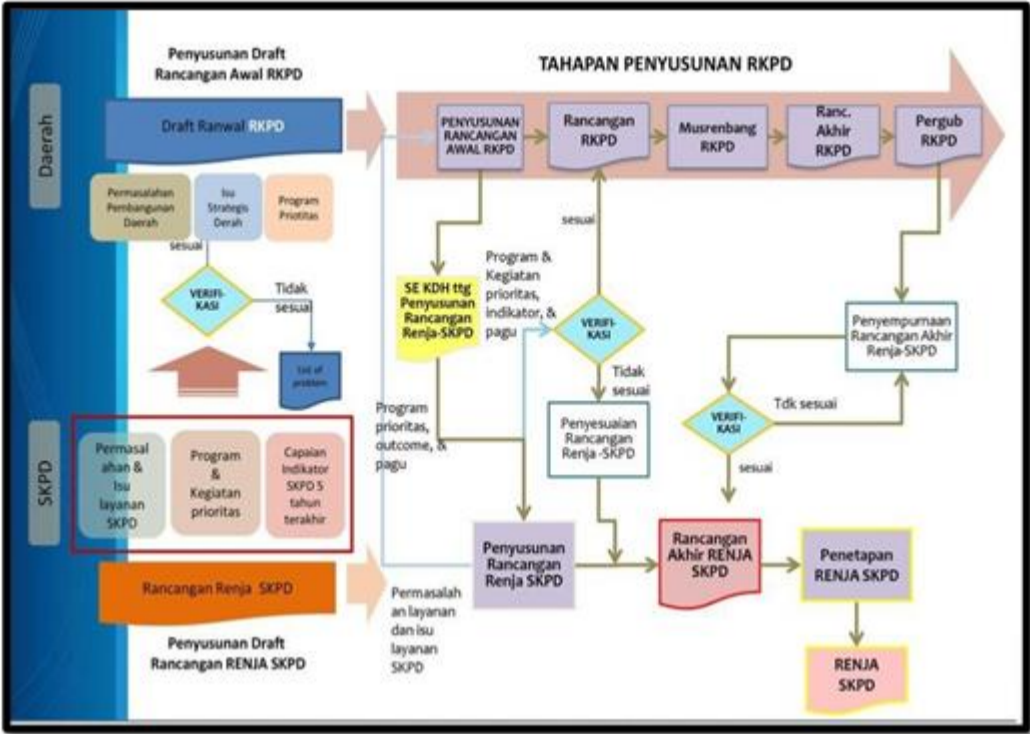
Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SOPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2025.

Renja SOPD merupakan dokumen rencana pembangunan SOPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2025 s/d 2029.

Gambar 1.1  
Hubungan antara RENJA dan Penyusunan RKPD



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2025 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
- 5) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  - 9) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  - 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  - 11) Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
- 14) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Tujuan :

- a. Memberikan arah dan panduan bagi penyelenggaraan pembangunan di Bidang Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Tahun 2025.
- b. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

### 1.4 Sistematika Penyusunan

#### BAB I : PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4	Review Terhadap Awal RKPD
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3	Program Kegiatan
Bab IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023 dan Capaian Renstra Diskominfo adalah realisasi terhadap pencapaian Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2023

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI INNFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2022 (N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun Lalu (2023)			Target Program / Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja OPD Tahun N-2 (2023)	Realisasi Renja OPD Tahun N-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (N-1) (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan daerah Dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Akhir Tahun SKPD dann Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	27 Stel	0	0	0	0	0%	27 Stel	27 Stel	100%

2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Bimtek Sesuai Tugas dan Fungsinya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah									
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bualn	100%	12 Bualn	12 Bualn	100%
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis dan logistik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya / berlangganan dengan mas media	120 Eksemplar	120 Eksemplar	120 Eksemplar	120 Eksemplar	120 Eksemplar	100%	120 Eksemplar	120 Eksemplar	100%
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Snack untuk rapat dan kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar kota dan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Insfrastruktur kantor									
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Lemari Arsip	0	0	0	0	0	0%	4 Buah	4 Buah	100%
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Komputer PC AIO	0	0	0	0	0	0%	2 Unit	2 Unit	100%
2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Tersedianya Perencanaan Gedung Multi Media	0	0	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100%
2	16	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bualn	12 Bualn	100%
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jas listrik dan Telepon	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keamanan dan Kebersihan	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	100%	8 Orang	8 Orang	100%
2	16	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayar pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya printer, laptop dan komputer	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	01	2.09	09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>										
2	16	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>										
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>										
1	20	04	2.02		<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>										
1	20	04	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penata Laksanaan Dan Pengawasan E-Government dalam	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota									
1	20	04	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya dan Terselenggarannya Jaringan Insfrastruktuk TIK	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
1	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL										
1	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
1	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Cetak Buku Statistk Daerah	4 Buku	4 Buku	4 Buku	4 Buku	4 Buku	100%	4 Buku	4 Buku	100%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										
2	21	02	2.21		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2	21	02	2.21	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan SOP Urusan Persandian	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,0%	2 Dok	2 Dok	100%

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2	21	02	2.21	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Sosialisasi Keamanan Data pada Lingkup SOPD dan Badan Publik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	21	02	2.21	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya radio SSB	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf d angka 12 Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

a. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merumuskan sasaran kinerja urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Sukamara sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Sasaran Indikator dan Target Kinerja Diskominfo

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan Pendukung	Penyediaan Anggaran
1.	Persentase jumlahOPD dan ruang terbuka publik yang tercakupinfrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh SOPD	86%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan	1.431789.086,00
		Distribusi Internet untuk seluruh OPD	86%		
		Tersedianya fasilitas internet di ruang publik	10 titik		

	Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Indeks Indikator SPBE	2,48	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	284.560.050,00
2	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK di wilayah Kabupaten Sukamara	10	Layanan Hubungan Media	1.161546.000,00
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun evaluasi	Jumlah OPD yang menggunakan data	100%	Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	43.650.000,00
4	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi	Jumlah informasi yang diamankan	100%	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.616.000,00
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	56.980.000,00
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000,00

- b. Capaian Kinerja
- Sasaran 1 : Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara sebagai leading sektor yang memiliki urusan Kominfo yaitu pemerataan dan optimalisasi Teknologi Informasi Komunikasi Daerah Kabupaten Sukamara.

1. Capaian Kinerja

- a. Capaian kinerja pada indikator ini adalah 26 SOPD sudah menggunakan jaringan Fiber optik yang di sediakan oleh Dinas Kominfosandi Kab Sukamara adalah sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, dari target awal 86% pada tahun 2023 dengan rincian sbb.

Tabel 2.2  
Daftar SOPD menggunakan jaringan Fiber Optik

NO	PERANGKAT DAERAH	KET
1	Sekretariat Daerah Kab, Sukamara	terhubung
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	terhubung
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	terhubung
4	Badan Kesbang dan Politik	terhubung
5	Bappeda	terhubung
6	Badan Penanggulangan Benacana Daerah	terhubung
7	Dinas Lingkungan Hidup	terhubung
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	terhubung
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	terhubung
10	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	terhubung
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	terhubung
12	Inspektorat Daerah	terhubung
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	terhubung
14	Dinas Perikanan	terhubung
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	terhubung
16	Dinas PU PR Perkim	terhubung
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	terhubung
18	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	terhubung
19	Dinas Perhubungan	terhubung
20	Dinas PP PA PP KB	terhubung
21	Dinas Kesehatan	terhubung
22	Satpol PP dan Damkar	terhubung
23	Sekretariat DPRD	terhubung
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	terhubung
25	Dinas Sosial dan PMD	terhubung
26	Kecamatan Sukamara	terhubung
27	Kecamatan Balai Riam	Belum terhubung
28	Kecamatan Permata Kecubung	Belum terhubung
29	Kecamatan Pantai Lunci	Belum terhubung
30	Kecamatan Jelai	Belum terhubung

Dengan realisasi keuangan sbb :

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.431.789.086	1.425.060.075	99,53%

- b. Capaian kinerja pada indikator ini adalah 26 SOPD sudah memanfaatkan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dengan pencapaian realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dari target awal 86 % pada tahun 2023 dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Daftar OPD Pengguna Internet  
yang disediakan oleh Dinas Kominfo

NO	PERANGKAT DAERAH	KET
1	Sekretariat Daerah Kab, Sukamara	terhubung
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	terhubung
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	terhubung
4	Badan Kesbang dan Politik	terhubung
5	Bappeda	terhubung
6	Badan Penanggulangan Benacana Daerah	terhubung
7	Dinas Lingkungan Hidup	terhubung
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	terhubung
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	terhubung
10	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	terhubung
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	terhubung
12	Inspektorat Daerah	terhubung
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	terhubung
14	Dinas Perikanan	terhubung
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	terhubung
16	Dinas PU PR Perkim	terhubung
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	terhubung
18	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	terhubung
19	Dinas Perhubungan	terhubung
20	Dinas PP PA PP KB	terhubung
21	Dinas Kesehatan	terhubung
22	Satpol PP dan Damkar	terhubung
23	Sekretariat DPRD	terhubung
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	terhubung
25	Dinas Sosial dan PMD	terhubung
26	Kecamatan Sukamara	terhubung
27	Kecamatan Balai Riam	Belum terhubung
28	Kecamatan Permata Kecubung	Belum terhubung
29	Kecamatan Pantai Lunci	Belum terhubung
30	Kecamatan Jelai	Belum terhubung

Dengan realisasi keuangan sbb :

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.431.789.086	1.425.060.075	99,53%

- c. Capaian kinerja pada pemanfaatan / pemasangan WIFI Publik untuk kepentingan umum di realisasikan 5 titik pada tahun anggaran 2023 dari target 5 titik atau terealisasi sebesar 100% dari target.

Tabel 2.4  
Lokasi Wifi Publik

No	Lokasi Wifi Publik	KET
1	Bunderan Besar Taman Makam Pahlawan	
2	Kantor Bupati Sukamara	
3	Taman Permata Sukma Disdukcapil	
4	Taman Peda	
5	Lapangan Mini/Masjid Besar	
6	Lapangan Koramil	
7	Pelabuhan Speed Sukamara	
8	Taman Kantor Perpusip	
9	Taman Baca	
10	Pasar Ikan (Rasar Saik)	

**Sasaran 2 : Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK**

Pada target kinerja ini terdapat kendala mendasar di lapangan yaitu kurangnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap arus informasi di daerahnya.

1. Capaian Kinerja

Terdaapt 10 (sepuluh) Kelompok Informasi Masyarakat yang berhasil dibentuk dari target sebanyak 10 kelompok.

2. Analisis Tercapai/Tidak tercapainya Target Kinerja

Pencapaian target kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara pada indikator kinerja ini sebesar 100 % terhadap target kinerja, yang mana dapat dikatakan tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. kurangnya minat masyarakat untuk ikut berpastisipasi
- b. kurangnya anggaran sosialisasi terkait kegiatan tersebut

3. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target kinerja
- Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pada indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya Anggaran
  - b. Kurangnya sosialisasi e\_government
4. Sedangkan solusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut Pengajuan Tambahan Anggaran untuk melakukan sosialisasi ditahun 2024 dan 2025.

**Sasaran 3 : Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunann daerah maupun evaluasi**

1. Capaian kinerja
- jumlah OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan Pembangunan daerah maupun evaluasi adalah sebesar 99,61% dari target awal. Dengan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

Realisasi Fisik dan Keuangan Statistik			
SUB KEGIATAN	ANGGARAN	RELAISASI KEUANGAN	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	43.650.000	43.478.420	99,61%

Daftar SOPD menggunakan Data Statistik untuk bahan perencanaan dan pelaporan

Tabel 2.5  
SOPD Pengguna Daftar Statistik

NO	PERANGKAT DAERAH	KET
1	Sekretariat Daerah Kab, Sukamara	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	Badan Kesbang dan Politik	
5	Bappeda	
6	Badan Penanggulangan Benacana Daerah	
7	Dinas Lingkungan Hidup	
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

10	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Inspektorat Daerah	
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
14	Dinas Perikanan	
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
16	Dinas PU PR Perkim	
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
18	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
19	Dinas Perhubungan	
20	Dinas PP PA PP KB	
21	Dinas Kesehatan	
22	Satpol PP dan Damkar	
23	Sekretariat DPRD	
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25	Dinas Sosial dan PMD	
26	Kecamatan Sukamara	
27	Kecamatan Balai Riam	
28	Kecamatan Permata Kecubung	
29	Kecamatan Pantai Lunci	
30	Kecamatan Jelai	

2. Analisis Tercapai/Tidak tercapainya Target Kinerja
- Pencapaian target kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara pada indikator kinerja ini sebesar 100 % terhadap target kinerja, yang mana dapat dikatakan berhasil/cukup berhasil/tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Komitmen awal dan semangat dari ASN Diskominfosandi untuk mendapatkan hasil yang maksimal

b. Tersedianya anggaran
3. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target kinerja
- Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pada indikator kinerja ini adalah sedikit terlambatnya proses cetak buku dan distribusinya, solusinya adalah melaksanakan pengadaan/pencetakan serta distribusi buku lebih cepat dari tahun ini.
4. Sedangkan solusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- Melaknsakan koordinasi dengan badan statistic daerah kabupeten Sukamara

**Sasaran 4 : Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi**

Adalah pelayanan pengaman terhadap administrasi pemerintah daerah terutama untuk surat masuk dan surat keluar menggunakan aplikasi BSSN

1. Capaian Kinerja
- Capaian kinerja OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.616.000	11.686.637	92,6
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	56.980.000	55.535.842	97,4
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	6.100.000	76,2

Daftar SOPD menggunakan Keamanan Persandian Yang di sediakan Oleh Dinas Kominfosandi sbb :

Tabel 2.6  
Daftar SOPD menggunakan SANAPATI

NO	PERANGKAT DAERAH	KET
1	Sekretariat Daerah Kab, Sukamara	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	Badan Kesbang dan Politik	
5	Bappeda	
6	Badan Penanggulangan Benacana Daerah	
7	Dinas Lingkungan Hidup	
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	

11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Inspektorat Daerah	
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
14	Dinas Perikanan	
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
16	Dinas PU PR Perkim	
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
18	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
19	Dinas Perhubungan	
20	Dinas PP PA PP KB	
21	Dinas Kesehatan	
22	Satpol PP dan Damkar	
23	Sekretariat DPRD	
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25	Dinas Sosial dan PMD	
26	Kecamatan Sukamara	
27	Kecamatan Balai Riam	
28	Kecamatan Permata Kecubung	
29	Kecamatan Pantai Lunci	
30	Kecamatan Jelai	

2. Analisis Tercapai/Tidak tercapainya Target Kinerja

Pencapaian target kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara pada indikator kinerja ini sebesar 100 % terhadap target kinerja, yang mana dapat dikatakan berhasil/cukup berhasil/tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Komitmen awal dan semangat dari ASN DiskominfoSandi untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- b. Tersedianya anggaran

3. Permasalahan dalam pencapaian target kinerja

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pada indikator kinerja ini adalah kurangnya anggaran dan sumber daya manusia.

4. Sedangkan solusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan / mengikuti pelatihan TIK
  - b. Pengusulan tenaga Teknis Persandian

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan

pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sukamara sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu:

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sukamara (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. BagianHumas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sukamara (Bidang Statistik);
4. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi) Sekretariat Daerah.

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai OPD baru, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada ke - empat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengacu pada Standar Pelayanan Minimum Bidang Kominfo sebagaimana pada Indikator Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

**Tabel C.30**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Inforamtika dan Persandian  
Kab. Sukamara

NO	INDIKATOR KINERJA	Spm / Standar Nasional	IKK	TARGET RESNTRA DAERH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Indeks SPBE		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,8	2,7	3	3,5	1,8	2,5	3	3,5	
2	Persentase perangkat daerah yang telah mengamankan informasi		Perangkat daerah menggunakan aplikasi yang mempunyai keamanan data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya buku statistik daerah		Buku Sukamara dalam angka,	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	tersdia	

4	Jaringan FO yang menghubungkan tiap		Jaringan Intranet	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	
5	Tersedianya internet untuk SOPD		Jaringan Internet	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	

### 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yaitu meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan Diskominfo dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama satu tahun berjalan, tantangan dan peluang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo yaitu :

1. Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam hal tersebut ada hambatan atau kendala dalam penyusunan Indeks SPBE yaitu :
  - Belum ada peraturan yang mengatur Arsitektur SPBE dari Kementerian
  - Belum adanya peraturan Bupati terkait Proses Bisnis
  - Untuk indikator audit TIK dalam aturan nasional belum ada lembaga swasta/negeri yang di tunjuk sebagai pemeriksa eksternal dalam audit TIK
2. Belum optimalnya pemanfaatan media sebagai sarana penyebaran informasi , khususnya website pemerintah daerah.
3. Ketersediaan dan kualitas data sektoral belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan data perencanaan pembangunan.
4. Jumlah kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang persandian belum mencukupi, serta belum adanya kelengkapan SOP terkait Keamanan Informasi.
5. Sarana prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika yang kurang memadai.

Strategi yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah :

1. Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai penyusunan SPBE adalah :
  - Merancang Arsitektur SPBE berdasarkan dari Perpres gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja.

- Ketersediaan Data Center
  - Adanya peningkatan kapasitas server untuk colocation aplikasi SPBE
  - Koordinasi dengan bagian Organisasi terkait Proses Bisnis Kabupaten karena Proses Bisnis sebagai acuan dasar merancang Arsitektur SPBE
2. Mengaktifkan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Sukamara.
  3. Penyusunan Metadata untuk mencukupi Ketersediaan dan kualitas data sektoral .
  4. Pelatihan sesuai spesifikasi pekerjaan dalam bidang persandian, Penyusunan SOP urusan persandian sesuai proses bisnis.
  5. Pengembangan sarana prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari permasalahan tersebut dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah:

Dalam rangka mendukung dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Periode 2018 – 2023 maka Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Tugas dan Fungsi melaksanakan misi Misi ke 2 (dua) yaitu : “Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis yang berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat “ maka dari itu sangat perlu meningkatkan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tantangan Dan Peluang dalam Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berikut :

Tantangan :

- Belum ada regulasi terkait pelaksanaan E-Governmen Kabupaten Sukamara Khususnya TIK
- Pembangunan Jaringan FIXED BROADBAND (FO) seluruh perangkat daerah Kab. Sukamara belum menyeluruh
- Optimalisasi Data Center Kab. Sukamara
- Peningkatan infrastruktur dan kualitas pengamanan informasi
- Pemahaman SDM terhadap pentingnya keamanan informasi masih terbatas.

Peluang :

- Ketersediaan SDM TIK
- Pengembangan Aplikasi secara mandiri untuk pelaksanaan SPBE
- Tersedianya Blue Print untuk pedoman pelaksanaan e-government
- Tersedianya DRC (Disaster Recovery Center ) yang berfungsi untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan ketika terjadi

#### **2.4 Review Terhadap Awal RKPD**

Review terhadap awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara awal RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar tercapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan/sub kegiatan maupun besaran pendanaanya.

Review terhadap awal RKPD Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sukamara Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel T-C. 31 sebagai berikut :

TABEL T-C 31  
Review Terhadap awal RKPD Tahun 2025  
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian  
Kabupaten Sukamara

No	AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				12.137.557.692,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				12.137.557.692,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.137.557.692,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.137.557.692,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.484.436.049,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.484.436.049,00	

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sukam ara	Persentase Keterpenu han administra si perangkat daerah	100%	5.284.120.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sukamar a	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi	12 Bulan 12 Laporan 2 Laporan 8 Laporan	5.552.757.209,00	
---	--	--------------	---	------	---------------	--	--------------	--	--	------------------	--

2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sukamara	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	100%	50.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sukamara	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa	100 % 1 Dokumen	1.367.040.000,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Sukamara	Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-government	65%	6.402.491.513,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Sukamara	Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-government	65%	2.564.638.840,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase pemenuhan data statistik Sektoral	100%	138.058.520,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah	100 %	428.803.210,00	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Sukam ara	Persentase Perangkat daerah yang telah mengguna kan layanan keamanan persandian	100 %	262.887.659,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Sukamar a	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	100 %	2.224.318.433,00	
---	---	--------------	---	-------	----------------	---	--------------	--	-------	------------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi. LSM. asosiasi-asosiasi. perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Tabel T - C32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2025  
Kabupaten Sukamara

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran /Volume	Catatan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

###### Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

###### a. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Visi Kementerian Kominfo adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang
2. sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
4. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
5. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
6. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus ditenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Sejumlah Sasaran Strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;

2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
  - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
  - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
  - c. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Governmen dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost- effective melalui:
  - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
  - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (*cloud computing*).
  - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
  - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
  - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
  - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
  - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
  - e. partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
  - f. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
  - g. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya,
  - h. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
  - i. Kampanye publik terkait revolusi mental;
  - j. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
  - k. Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
  - l. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
  - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
- c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media

**b. Lembaga Sandi Negara**

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar kabupaten lingkungan Kabupaten;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi
11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
12. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

13. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
16. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
17. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
18. Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan hubungan komunikasi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
19. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
20. Pengamanan terhadap kegiatan / asset / fasilitas / instalasi penting / vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. Pengamanan informasi elektronik;
22. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
26. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

**c. Badan Pusat Statistik**

Merujuk pada visi Badan Pusat Statistik sebagai **“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2025	2026	2027	2028	2029
I	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Optimalisasi Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Berbasis SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
II	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Optimalisasi Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Berbasis SPBE ( Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi	100	100	100	100	100

				Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah					
III	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat Dan Dapat Diandalkan,	Tersedianya Satu Data Daerah Yang Mudah Diakses Masyarakat	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
III	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas	Meningkatnya Keamanan Informasi	Meningkatnya Pemahaman Tentang Keamanan Data dan Informasi	Persentase personil bidang keamanan siber	50	50	50	50	50

	Kinerja Instansi Pemerintah			dan sandi yang mempunyai setifikat pelatihan teknis					
IV	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	68	69	69	75

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting staff yang melaksanakan koordinasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan e-Government di Pemerintah Kabupaten Sukamara dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang e-Government dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kebijakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukamara, pada dasarnya kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah sebagai “pendukung” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SOPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara untuk mencapai tujuan dan sasarannya adalah :

T-C 33  
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIANKAB. SUKAMARA  
TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				12.137.557.692,00				10.169.908.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.137.557.692,00				10.169.908.000,00
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.484.436.049,00				8.689.908.000,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan		12 Bulan 12 Laporan 2 Laporan 8 Laporan	5.552.757.209,00			12Bulan 2Laporan	4.958.748.000,00

						Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia							
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	40.250.000,00			-	30.000.000,00
2	16	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	4 Laporan	40.250.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			30.000.000,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik		1 Dokumen 10 Laporan 12 Bulan 2 Laporan	3.029.134.085,00			1Dokumen 2Laporan	3.046.748.000,00
2	16	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukamara, Semua	24 Orang/bulan	2.977.054.085,00	DANA TRANSFER UMUM-		21 Orang/bulan	2.961.748.000,00

							Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak			DANA ALOKASI UMUM			
2	16	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	8 Dokumen	52.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	85.000.000,00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik		12 Laporan 2 Laporan	300.000.000,00			2Laporan	200.000.000,00
2	16	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	7 Orang	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	200.000.000,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik		12 Bulan 1 Laporan	713.484.644,00			1Laporan	442.000.000,00

2	16	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	1 Paket	34.712.994,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	20.000.000,00
2	16	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	1 Paket	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	20.000.000,00
2	16	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	1 Paket	25.724.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00
2	16	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	1 Paket	52.867.650,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	40.000.000,00
2	16	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	2 Paket	25.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	25.000.000,00
2	16	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	3 Dokumen	-	-		4 Dokumen	10.000.000,00

2	16	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	3 Laporan	25.130.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.000.000,00
2	16	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	1 Laporan	550.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Laporan	300.000.000,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasana pendukung perkantoran Dinas Kominfo sandi Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik		4 paket 4 Paket	847.211.000,00			4Paket	600.000.000,00
2	16	01	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	3 Unit	563.596.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	300.000.000,00
2	16	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	10 Unit	226.080.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	100.000.000,00
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	1 Unit	57.535.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		1 Unit	200.000.000,00

										ALOKASI UMUM			
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik		12 Bulan 12 Laporan	325.079.880,00			12Bulan	360.000.000,00
2	16	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	12 Laporan	104.925.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		24 Laporan	140.000.000,00
2	16	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	8 Laporan	220.154.880,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		8 Laporan	220.000.000,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik		2 Paket 2 Dokumen	297.597.600,00			2Dokumen	280.000.000,00
2	16	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	14 Unit	153.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM			150.000.000,00

2	16	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	14 Unit	62.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			80.000.000,00
2	16	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	1 Unit	82.047.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			50.000.000,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa		100 % 1 Dokumen	1.367.040.000,00			1Dokumen	1.360.000.000,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa		1 Dokumen	1.367.040.000,00			1Dokumen	1.360.000.000,00
2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara,	14 Laporan	1.298.180.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.300.000.000,00

							Natai Sedawak						
2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	10 Permohonan	68.860.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			60.000.000,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-government		65 %	2.564.638.840,00			-	2.371.160.000,00
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat mitra pemerintah		5 kelompok	53.200.000,00			-	30.000.000,00
2	16	03	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	30 Dokumen	53.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			30.000.000,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis SPBE Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik berbasis SPBE		12 Bulan 12 Bulan	2.511.438.840,00			-	2.341.160.000,00

2	16	03	2.02	19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	3 Dokumen	315.290.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			100.000.000,00
2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	30 Perangkat Daerah	448.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			341.160.000,00
2	16	03	2.02	27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	1 Program	217.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			300.000.000,00
2	16	03	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara,	27 Perangkat Daerah	1.529.988.840,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			1.600.000.000,00

							Natai Sedawak						
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				428.803.210,00				380.000.000,00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah		100 %	428.803.210,00			100 %	380.000.000,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah		100 %	428.803.210,00			100%	380.000.000,00
2	20	02	2.01	9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	80 Persentase	237.453.210,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			230.000.000,00
2	20	02	2.01	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	30 Dokumen	191.350.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			150.000.000,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				2.224.318.433,00				1.100.000.000,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian		100 %	2.224.318.433,00			100 %	1.100.000.000,00

2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian		100 %	2.224.318.433,00			100%	1.100.000.000,00
2	21	02	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	6 Laporan	110.790.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	100.000.000,00
2	21	02	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	3 Laporan	2.113.528.433,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	1.000.000.000,00
J U M L A H									12.137.557.692,00				10.169.908.000,00

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukamara Tahun  
2025

Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sukamara Tahun  
2025

Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025										
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Kelompok Sasaran	Pagu Indikatif 2026	
				RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN			12.137.557.692	8.580.866.322	8.580.866.322	Sukamara		10.669.908.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.137.557.692	8.580.866.322	8.580.866.322	Sukamara		10.669.908.000	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.484.436.049	8.376.506.322	8.410.808.822	Sukamara		9.189.908.000	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Bulan	5.552.757.209	4.427.648.392	4.475.322.142	Sukamara		5.458.748.000	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Bulan	40.250.000	30.490.000	30.490.000	Sukamara		30.000.000	

2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	40.250.000	30.490.000	51.250.000	Sukamara	ASN Diskominfo	30.000.000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Bulan	3.029.134.085	3.312.225.467	3.312.225.467	Sukamara	ASN Diskominfo	3.046.748.000
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	2.977.054.085	3.271.085.467	3.191.389.102	Sukamara	ASN Diskominfo	2.961.748.000
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	52.080.000	41.140.000	38.440.000	Sukamara	ASN Diskominfo	85.000.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Laporan 2 Laporan	300.000.000	120.000.000	120.000.000	Sukamara	ASN Diskominfo	200.000.000
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	300.000.000	120.000.000	90.000.000	Sukamara	ASN Diskominfo	200.000.000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Bulan 1 Laporan	713.484.644	404.959.045	404.959.045	Sukamara	ASN Diskominfo	442.000.000
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.712.994	56.752.000	6.752.000	Sukamara	ASN Diskominfo	20.000.000
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-			Sukamara	ASN Diskominfo	20.000.000
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.724.000	26.024.000	26.024.000	Sukamara	ASN Diskominfo	25.000.000
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.867.650	39.177.600	50.693.160	Sukamara	ASN Diskominfo	40.000.000
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.050.000	19.000.445	21.375.000	Sukamara	ASN Diskominfo	25.000.000

2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	-				Sukamara	ASN DiskominfoSandi	10.000.000
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	25.130.000	24.005.000	23.925.000		Sukamara	ASN DiskominfoSandi	2.000.000
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	550.000.000	240.000.000	220.000.000		Sukamara	ASN DiskominfoSandi	300.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasana pendukung perkantoran Dinas KominfoSandi	4 paket 4 Paket	847.211.000				Sukamara	ASN DiskominfoSandi	1.100.000.000
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	563.596.000				Sukamara	ASN DiskominfoSandi	300.000.000
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	226.080.000				Sukamara	ASN DiskominfoSandi	100.000.000
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-		177.900.000		Sukamara	ASN DiskominfoSandi	500.000.000
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	57.535.000				Sukamara	ASN DiskominfoSandi	200.000.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	12 Bulan 12 Laporan	325.079.880	369.993.880	369.993.880		Sukamara	ASN DiskominfoSandi	360.000.000
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104.925.000	176.239.000	182.639.000		Sukamara	ASN DiskominfoSandi	140.000.000
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	220.154.880	193.754.880	193.754.880		Sukamara	ASN DiskominfoSandi	220.000.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik	2 Dokumen 2 Paket	297.597.600	189.980.000	189.980.000		Sukamara	ASN DiskominfoSandi	280.000.000

2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	153.500.000	140.430.000	146.830.000	Sukamara	ASN Diskominfo	150.000.000
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	62.050.000	49.550.000	54.350.000	Sukamara	ASN Diskominfo	80.000.000
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	82.047.600			Sukamara	ASN Diskominfo	50.000.000
2	16	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan</b>	<b>100%</b>	<b>1.367.040.000</b>	<b>1.885.155.000</b>	<b>1.707.425.000</b>	<b>Sukamara</b>	<b>Masyarakat Sukamara</b>	<b>1.360.000.000</b>
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi informasi dengan menggunakan sarana media massa	1 Dokumen	1.367.040.000	1.885.155.000	1.885.155.000	Sukamara	Masyarakat Sukamara	1.360.000.000
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	14 Laporan	1.298.180.000	1.885.155.000	1.707.425.000	Sukamara	Masyarakat Sukamara	1.300.000.000
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	68.860.000			Sukamara	Masyarakat Sukamara	60.000.000
2	16	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-government</b>	<b>100%</b>	<b>2.564.638.840</b>	<b>2.063.702.930</b>	<b>2.228.061.680</b>	<b>Sukamara</b>	<b>Masyarakat Sukamara</b>	<b>2.371.160.000</b>

2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat mitra pemerintah	25 Kelompok	53.200.000	109.866.250	109.866.250	Sukamara	Masyarakat Sukamara	30.000.000
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	30 Dokumen	53.200.000	109.866.250	72.800.000	Sukamara	Masyarakat Sukamara	30.000.000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis SPBE Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik berbasis SPBE	12 Bulan	2.511.438.840	1.953.836.680	1.953.836.680	Sukamara	Masyarakat Sukamara	2.341.160.000
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	3 Dokumen	315.290.000	131.950.000	323.375.000	Sukamara	Masyarakat Sukamara	100.000.000
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	26 PD	448.660.000	300.096.000	325.096.000	Sukamara	Masyarakat Sukamara	341.160.000
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	217.500.000			Sukamara	Masyarakat Sukamara	300.000.000
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	26 PD	1.529.988.840	1.521.790.680	1.506.790.680	Sukamara	Masyarakat Sukamara	1.600.000.000
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>428.803.210</b>	<b>79.780.000</b>	<b>50.477.500</b>	<b>Sukamara</b>	<b>Masyarakat Sukamara</b>	<b>380.000.000</b>

2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>428.803.210</b>	<b>79.780.000</b>	<b>50.477.500</b>	<b>Sukamara</b>	<b>Masyarakat Sukamara</b>	<b>380.000.000</b>
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah	100 %	428.803.210	79.780.000	79.780.000	Sukamara	Masyarakat Sukamara	380.000.000
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80 Persentase	237.453.210	79.780.000	50.477.500	Sukamara	Masyarakat Sukamara	230.000.000
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	30 Dokumen	191.350.000			Sukamara	Masyarakat Sukamara	150.000.000
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>2.224.318.433</b>	<b>124.580.000</b>	<b>119.580.000</b>	<b>Sukamara</b>	<b>Masyarakat Sukamara</b>	<b>1.100.000.000</b>
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian</b>	<b>100 %</b>	<b>2.224.318.433</b>	<b>124.580.000</b>	<b>119.580.000</b>	<b>Sukamara</b>	<b>Masyarakat Sukamara</b>	<b>1.100.000.000</b>
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	100 %	2.224.318.433	124.580.000	124.580.000	Sukamara	Masyarakat Sukamara	1.100.000.000
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	110.790.000	124.580.000	119.580.000	Sukamara	Masyarakat Sukamara	100.000.000
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	2.113.528.433			Sukamara	Masyarakat Sukamara	1.000.000.000

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan / penjabaran Renstra secara tahunan. Rencana Kerja Tahunan sangat penting karena keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra sangat tergantung pada perencanaan tahunan yang disusun.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Selain itu Rencana Kerja Tahun ini juga berfungsi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2025 sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Tupoksi dan pencapaian kinerja selama tahun 2025 nanti.

Kedepan diharapkan Rencana Kerja Tahunan ini dapat sebagai pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya guna meningkatkan dan memperbaiki keberhasilan kinerja yang belum tercapai. Didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan. maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara.

#### **B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029 tersebut. di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut. ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah - langkah sebagai berikut:

1. RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2025 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja pemerintah daerah.
3. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJM, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten).

### C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Semoga keberadaan Renja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Sukamara serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara.

Sukamara, Juni 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi Informatika dan Persandian  
Kabupaten Sukamara

  
**DENNY YUDHISTIRA KURNIAWAN, S.IP**  
NIP. 19750708 200312 1 009